

Pendekatan Tiga Pilar Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan Berperspektif Gender *Three Pillars Approach as Gender Perspective and Poverty Alleviation Model*

Rosalia Indriyati S., Tri Siwi Nugrahani, dan Sri Rejeki

Universitas PGRI Yogyakarta, Jl. PGRI I/117 Sonosewu Yogyakarta Telpn (0274) 376808, fax (0274) 376808.

E-mail: iin.rosalia@yahoo.com Diterima 17 November 2014, direvisi 20 Februari 2015, disetujui 15 Maret 2015

Abstract

The purpose of this research are to conduct an inventory of village poverty problems, describe the actual conditions of rural women poverty map, analyze the poverty alleviation programs with a gender perspective, as well as an overview of coordination between relevant agencies poverty alleviation programs, formulate policy design strategy model of poverty reduction through socio-cultural approach and economics. This research is qualitative approach. Data are collected through observation, documentation, and depth interview. Research subjects are officials and community members of poverty alleviation programs. It can be revealed that the numbers of poor households in Sleman Regency are 45.037 families (13.89 persen). Various poverty alleviation programs have been conducted by various work units, but the synergy among units in the poverty eradication program not yet works, although the target data used program has been one source. Programs among agencies run their own because they often work in sectoral programs. The results of the research can be summarized as follows: Sleman district government strongly supports reduction gender perspective model, since there is a gender disparity in Sleman, which can be seen from index of 79.29 persen, gender development index 75.76 persen and gender inequality gap 3.65 persen. This is due to the access to better education school are male dominated; Access to capital strengthening male-dominated, women still lack of access. Poverty alleviation models with a gender perspective can be tested in Sleman, and will be a pioneer for women with access to poverty reduction. The results of the questionnaire showed that the stage in the design of the model is expressed well, and the meaning of each stage is considered good. Thus, the model of a gender perspective in poverty reduction strategies can be tested.

Keywords: *Three Pillars; Poverty Reduction Model; Gender Perspective*

Abstrak

Tujuan penelitian untuk melakukan inventarisasi masalah kemiskinan di desa, mendeskripsikan kondisi aktual peta kemiskinan perempuan desa, menganalisis program pengentasan kemiskinan berperspektif gender, gambaran koordinasi antar instansi terkait program pengentasan kemiskinan, dan merumuskan rancangan kebijakan model strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan sosio kultural, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara mendalam. Subyek penelitian pejabat dinas terkait dan masyarakat sasaran program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah KK miskin Kabupaten Sleman 45.037 KK (13,89 persen). Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi belum diketahui secara pasti tingkat sinergitas antarinstansi dalam program pengentasan kemiskinan, meskipun data sasaran program yang digunakan satu sumber. Program antarinstansi berjalan sendiri-sendiri karena masih sering terjadi program sektoral. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dapat dirangkum sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Sleman sangat mendukung model pengentasan berperspektif gender, mengingat masih ada ketimpangan gender, yang dapat diketahui dengan IPM 79,29 persen, indeks pembangunan gender 75,76 persen ada kesenjangan 3,65 persen kesenjangan gender, dikarenakan akses pendidikan lama sekolah lebih bagus laki-laki, penguatan modal didominasi laki-laki, perempuan masih kurang mendapatkan akses, sehingga model pengentasan kemiskinan dengan perspektif gender dapat diujicobakan di Kabupaten Sleman, dan menjadi pionir untuk perempuan dengan akses mengurangi kemiskinan. Hasil angket menunjukkan, bahwa tahapan dalam rancangan model dinyatakan baik, makna dari setiap tahapan dinilai baik. Model dari strategi pengentasan kemiskinan berperspektif gender dapat diujicobakan.

Kata Kunci: *Tiga Pilar; Model Pengentasan Kemiskinan; Perspektif Gender*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Sebagai fenomena sosial yang multi dimensional, kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan dimensi ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan masalah struktural, psikologis, kultural, ekologis dan faktor lain. Jumlah masyarakat miskin tampaknya akan semakin banyak, dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar korban kemiskinan adalah perempuan dan anak. Masih banyak perempuan mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek sosial, budaya juga ekonomi. Perempuan desa khususnya masih banyak yang tidak berdaya. Rupanya usaha peningkatan potensi perempuan di Indonesia masih harus mendapat perhatian. Pembangunan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis perempuan saja, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak kewajiban status dan akses dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai fenomena sosial, kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan masalah struktural, psikologis, kultural, ekologis dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi (Indriyati & Nugrahani, 2010)

Kondisi ekonomi keluarga di Kabupaten Sleman pada tahun 2006 dapat diklasifikasikan menjadi keluarga tidak miskin berjumlah 183.004 dan keluarga miskin berjumlah 62.518 (proporsi 25,46 persen). Pada tahun 2007 dapat diklasifikasikan menjadi keluarga tidak miskin sebanyak 211.841 KK dan keluarga miskin sebanyak 58.701 (proporsi 21,70 persen) (Bapeda Sleman, 2007: 6) Jumlah penduduk di kabupaten Sleman pada tahun 2012 sebesar 1.114.833 jiwa, terdiri dari 557.911 laki-laki dan 556.922 perempuan. Kondisi ekonomi keluarga di Kabupaten Sleman pada tahun 2012-2013 dapat diklasifikasikan menjadi keluarga miskin berjumlah 49.441 KK (15.85 persen) dan keluarga tidak miskin berjumlah 262.618 KK (84,15 persen) (BPS Kabupaten Sleman, 2013). Dengan melihat

data tersebut, tampak bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman masih cukup tinggi (15.85 persen), meskipun telah terjadi penurunan, namun jika kondisi ekonomi yang sangat sulit saat ini tidak makin membaik, ada kemungkinan akan bertambah jumlah kemiskinan ditahun yang akan datang.

Oleh karena itu, sudah selayaknya berbagai program pengentasan kemiskinan perlu menjadi prioritas pembangunan. Dari hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan perlu melibatkan perempuan sebagai subyek, agar perempuan dapat mengetahui permasalahan, potensi dan kebutuhannya, sehingga akan berkembang sesuai potensi. Adanya bencana gunung merapi dapat diduga bahwa jumlah KK miskin di daerah Kabupaten Sleman akan meningkat pasca bencana Gunung merapi, karena bencana Gunung Merapi selain korban jiwa juga kerugian material yang tidak sedikit (Indriyati & Nugrahani, 2010).

Pembangunan yang telah dilakukan oleh negara berkembang termasuk Indonesia belum membawa dampak yang menguntungkan bagi sebagian besar perempuan. Laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun, namun jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dari 73,3 juta tahun 1945 menjadi 219,5 juta pada tahun 2005, dengan hampir setengahnya (49,8 persen) adalah perempuan. (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI, 2005: 5). Untuk Propinsi DIY pada tahun 2000 dengan jumlah penduduk sebanyak 3.295.127 jiwa, ini merupakan daerah terpadat setelah DKI. Persentase jumlah penduduk laki-laki 49,44 persen, dan 50,56 persen perempuan (Laporan Tim Pembangunan Berperspektif Gender, 2003). Hal ini merupakan potensi yang dapat digunakan sebagai subyek pembangunan sebagai langkah awal pengembangan program pembangunan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan pembangunan Indonesia secara umum ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada aspek keadilan dengan menghargai hak-hak warga negara tanpa membedakan ras, suku, golongan, dan jenis ke-

lamin. Untuk menuju ke arah pembangunan yang adil gender dan mengikis ketimpangan pelaksanaan pembangunan ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap aspek pembangunan. Langkah ini diwujudkan dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan penguasaan terhadap proses pembangunan. (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, DIY 2013)

Kemiskinan merupakan isu gender, karena peran sentral perempuan dalam manajemen kesejahteraan keluarganya. Krisis dimensional seperti yang dialami bangsa Indonesia saat ini ekonomi, politik dan sosial, bencana alam, banjir, dan lain-lain, sehingga membuat harga kebutuhan pangan seperti harga beras dan kebutuhan pokok lainnya naik, juga kesulitan air bersih dan lain-lain membuat perempuanlah yang memikul beban paling berat. Oleh karena itu memperhatikan masalah perempuan sangatlah penting, karena antara kualitas ibu rumah tangga dan kualitas keluarga saling berhubungan. Hal ini dapat dipahami, bahwa jika kualitas perempuan sebagai ibu rumah tangga rendah, akan berpengaruh pada kualitas keluarga. Perempuan sebagai ibu rumah tangga berperan dalam menjalankan fungsi keluarga dan fungsi reproduksi. Bagaimana caranya melaksanakan peran dengan baik, jika dirinya sendiri sebagai perempuan masih rapuh atau rentan.

Kaum perempuan pada masyarakat miskin umumnya selalu berupaya melepaskan diri dari belenggu kesulitan ekonomi dan mengusahakan kehidupan ekonomis yang lebih baik dalam bentuk atau kiat tertentu dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara optimal, memberdayakan perempuan dalam rumah tangga miskin merupakan masalah yang mendesak dalam strategi pengentasan kemiskinan.

Dalam menghadapi globalisasi diperlukan komitmen bersama, untuk bersatu dengan semangat solidaritas dan membangun relasi setara

antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Perempuan perlu dilibatkan dalam membuat perencanaan, melaksanakan program kegiatan, dan melakukan evaluasi serta menganalisis dampak pembangunan. Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya membangkitkan masyarakat miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan mendampingi perempuan melalui pendekatan humanistik, pendekatan ekonomi produktif dan kesadaran lingkungan hidup. Pengalaman melaksanakan Pengabdian Masyarakat melalui Hibah PPM IbM tahun 2009 (Indriyati, dkk., 2009) pemberdayaan perempuan melalui partisipasi aktif sasaran, menghasilkan manfaat bagi kesejahteraan perempuan dan keluarganya. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian Kajian Wanita, yang berkaitan dengan strategi penanggulangan kemiskinan (Indriyati dan Nugrahani, 2010).

Dengan analisis gender memungkinkan suatu program pembangunan memfokuskan pada relasi gender yang setara. Dengan demikian yang menjadi agenda utama perjuangan pembangunan berperspektif gender adalah tidak sekedar menjawab kebutuhan praktis perempuan saja tetapi menjawab kebutuhan strategis perempuan, yaitu memperjuangkan perubahan posisi perempuan untuk keadilan. Usaha pemberdayaan (*empowerment*) dan perubahan struktur gender yang dikenal dengan *Gender and Development* (GAD). Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak asasinya. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Untuk memberdayakan perempuan dan untuk meningkatkan statusnya perlu adanya model pemberdayaan yang dapat menyadarkan perempuan agar dapat menggali potensi yang ada pada perempuan baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Model yang akan diterapkan dalam penelitian ini melalui pendekatan sosiokultural, ekonomi, dan lingkungan. Dengan pendekatan sosio kultural perempuan mempunyai kesadaran

akan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya dan posisi dalam budayanya, sedangkan pemberdayaan melalui ekonomi merupakan hal yang sangat penting, mengingat masalah pemenuhan kebutuhan pokok merupakan unsur utama pada masyarakat miskin. Sedangkan kesadaran mengenai pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pendekatan yang tersebut. Melalui penyadaran lingkungan hidup, maka generasi mendatang tetap akan dapat menikmati lingkungan yang lestari, sehat dan aman. Dengan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dimunculkan adalah apakah melalui pendekatan tri pilar yaitu sosiokultural, ekonomi, dan lingkungan hidup dapat dijadikan model yang tepat dalam Pengentasan Kemiskinan Berperspektif Gender?

B. Penggunaan Metode Penelitian

Teknik Pengumpulan Data: Data sekunder, didapat dengan mengumpulkan dokumen pelbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan, berupa profil lembaga, peraturan, sumber dana dalam mendukung pelaksanaan program, dikumpulkan secara acak dengan asas kelayakan, yakni peneliti menganggap data bersangkutan representatif. Data sekunder mempunyai peran besar menjadi bahan perbandingan antara fakta yang ditemui di lapangan dan tulisan yang diprogramkan, mempengaruhi penulis dalam penafsiran data. Data primer didapat melalui, wawancara mendalam (*depth interview*), dengan pimpinan lembaga yang bersangkutan, asumsinya pimpinan merupakan penentu kebijakan atas kegiatan program jejaring yang dibangun dengan lembaga lain. *Depth interview* menggunakan instrumen *interview guide* guna memudahkan dan memberi petunjuk dalam rangka pengumpulan data. Observasi, dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan langsung segala yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, teknik ini sebagai alat untuk melengkapi teknik lainnya. *Focus grup discussion (FGD)*, sebagai narasumber dalam FGD adalah pejabat Bappeda Kabupaten Sleman (Kepala Bidang Sosial Budaya), Kepala

Dinas Nakersos Kabupaten Sleman, dan Badan KBPMPP diwakili oleh Kasubbid Penanganan Kemiskinan. FGD juga diikuti oleh kepala seksi kesmas kecamatan Turi, Cangkringan dan Ngemplak, dan beberapa tokoh perempuan yang sering terlibat dalam program pengentasan kemiskinan. Teknik ini sengaja digunakan untuk memperdalam, sekaligus sebagai *crosscheck* berbagai informasi yang diperoleh dari wawancara.

Analisis Data, menggunakan model Miles and Huberman yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Heberman (1984) mengemukakan, bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*, *verification*, (Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2012). Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan setelah data berhasil dikumpulkan kemudian direduksi yaitu data yang ada disaring melalui pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan sehingga mendapatkan data yang diharapkan. Penyajian data berupa narasi, dari data yang dimiliki dari berbagai informasi tersebut digabungkan agar tersusun dalam bentuk terpadu dan mudah dipahami, kemudian dibuat deskripsi, dan dilihat tendensi-tendensinya, kemudian dibuat interpretasi, yang pertanyaan dalam penelitian, lalu ditempatkan sebagai kesimpulan hasil penelitian program pemberdayaan perempuan sebagai strategi pengentasan kemiskinan.

Pengembangan Penelitian: meliputi kegiatan mengidentifikasi masalah untuk melihat bagaimana identifikasi data berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat miskin,

kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat, yang akhirnya disusun laporan sebagai dasar untuk membuat rancangan model pengentasan kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 1.

Hasil dari penelitian tersebut perlu dianalisis kemudian dirumuskan menjadi model pengentasan kemiskinan. Rancangan model perlu dilakukan ujicoba kemudian dilakukan pengkajian melalui *Focus Group Discussion* (FGD) diharapkan melalui FGD tersebut dapat menyempurnakan model. Model pemberdayaan masyarakat berperspektif gender melalui Tri Pilar Pendekatan Sosiokultural, ekonomi, dan Lingkungan hidup, dapat dijadikan panduan/acuan penetapan kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang akan datang.

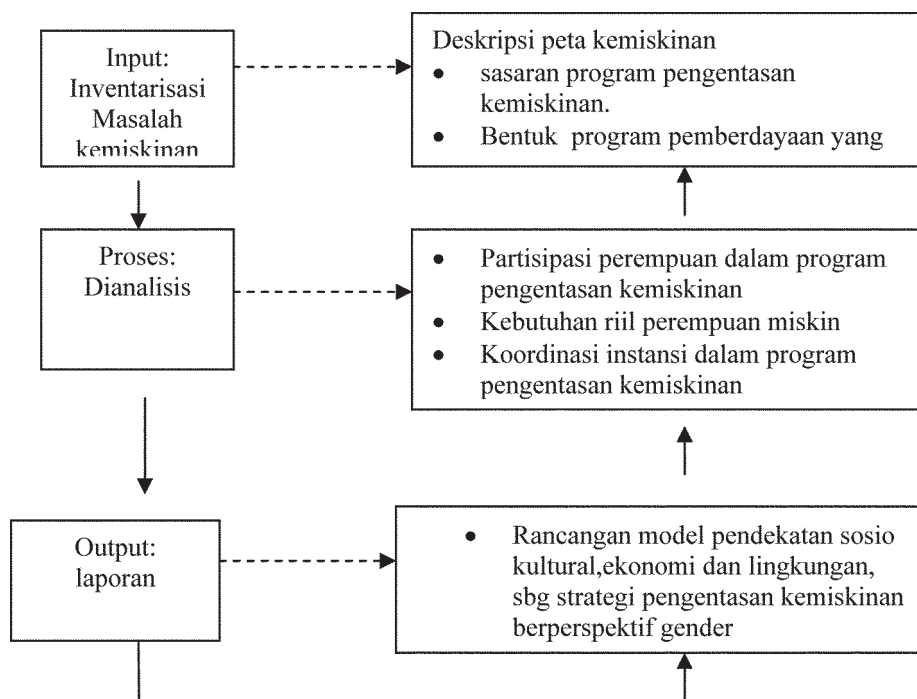
C. Hasil Dan Pembahasan

1. Deskripsi Umum Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten dalam Provinsi DIY yang berada di bagian utara dengan luas sekitar 247,82 km². Untuk menyelenggarakan administrasi peme-

rintahan, kabupaten ini secara berjenjang dibagi menjadi 17 kecamatan, 86 desa serta 1.212 padukuhan. Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai 110° 13' 00" sampai 110° 33' 00" Bujur Timur, dan mulai 7° 34' 52" sampai 7° 47' 03" Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 100 – 2.500 meter di atas permukaan air laut. Jarak terjauh Utara - Selatan kira-kira 35 km, terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa, dan 1.212 padukuhan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, bagian selatan berbatasan dengan kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta dan bagian Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Wilayah di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur, sedang bagian utara sebagian besar merupakan tanah kering yang berupa ladang dan pekarangan, serta memiliki permukaan yang agak miring ke selatan dengan batas paling utara adalah Gunung Merapi. Di lereng selatan Gunung Merapi terdapat dua buah bukit,



Gambar 1.
Prosedur Pengembangan Penelitian

yaitu Bukit Turgo dan Bukit Plawangan yang merupakan bagian dari Kawasan Wisata Kaliurang. Beberapa sungai yang mengalir melalui Kabupaten Sleman menuju Pantai Selatan antara lain Sungai Progo, Krasak, Sempor, Kuning Boyong, Winongo, Gendol dan Opak.

2. Deskripsi Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Sleman Tahun 2012 sebesar 1.114.833 jiwa, terdiri dari 557.911 laki-laki dan 556.922 perempuan. Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 1.

Dari Tabel 1 tersebut diketahui bahwa persentase tertinggi jumlah penduduk ada pada usia 60 tahun lebih yaitu sebesar 10,40 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa harapan usia hidup di Sleman cukup tinggi, namun jika dilihat untuk tingkat produktifitas usia tersebut sudah kurang produktif. Urutan kedua ada pada usia 20 – 24 tahun yaitu sebesar 10,25 persen usia ini merupakan usia dewasa awal yang perlu diperhatikan untuk dapat menjadi generasi penerus yang mandiri, handal, dan berkarakter. Jika dilihat dari jenis kelamin tidak ada perbedaan yang menyolok antar jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Jumlah

penduduk laki-laki ada sebesar 50,04 persen, sedangkan jumlah penduduk perempuan 49,96 persen. Dengan melihat data penduduk tersebut akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan tentang pembangunan daerah.

3. Peta Kemiskinan di Kabupaten Sleman

Untuk mengetahui peta kemiskinan di Kabupaten Sleman dapat diketahui melalui data jumlah kepala keluar miskin di tingkat kecamatan, jumlah kepala keluarga miskin di lihat dari jenis kelamin. Dari Tabel 2 diketahui bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten Sleman pada tahun 2012 sebesar 49.471 KK (15,85 persen), dan tampak pula bahwa tiga kecamatan yang digunakan sebagai sampel penelitian ini cukup tinggi tingkat kemiskinannya yaitu Kecamatan Ngemplak 2.396 KK (14,76 persen), Kecamatan Turi 2.158 KK (19,45 persen), dan Kecamatan Cangkringan 4.572 KK (47,78 persen). Untuk Kecamatan terbesar tingkat kemiskinannya adalah di Kecamatan Cangkringan. Hal ini sangat dapat dimengerti, mengingat untuk Kecamatan Cangkringan merupakan daerah yang paling parah terkena dampak erupsi Gunung Merapi pada Tahun 2010. Namun pada tahun 2014 ini dari data yang di peroleh dari Bappeda Kabu-

Tabel 1
Banyaknya Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	persen	Perempuan	persen	Jumlah Total	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-4	45.099	8,08	42.825	7,69	87.924	7,89
5-9	40.460	7,25	38.517	6,92	78.977	7,08
10-14	39.281	7,04	37.345	6,71	76.626	6,87
15-19	47.112	8,44	45.689	8,20	92.801	8,32
20-24	59.630	10,69	54.607	9,81	114.237	10,25
25-29	55.517	9,95	50.670	9,10	106.187	9,52
30-34	46.778	8,38	45.579	8,18	92.357	8,28
35-39	41.930	7,52	42.380	7,61	84.310	7,56
40-44	40.413	7,24	41.513	7,45	81.926	7,35
45-49	35.170	6,30	37.399	6,72	72.569	6,51
50-54	29.556	5,30	31.853	5,72	61.409	5,51
55-59	24.404	4,37	25.117	4,51	49.521	4,44
60+	52.561	9,42	63.428	11,39	115.989	10,40
Jumlah	557.911	100,00	556.922	100,00	1.114.833	100,00

Sumber: Sensus Penduduk 2010 dalam BPS Kab.Sleman (2013)

Tabel 2
Jumlah Kepala Keluarga Miskin dan Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Jumlah Kk	Kk Miskin	Persen	Jumlah Jiwa	Jiwa Miskin	Laki - Laki	Perempuan
1	Gamping	27.697	3.175	11,46	91.880	11.587	5.846	5.741
2	Godean	21.456	3.259	15,19	70.208	11.634	5.848	5.786
3	Moyudan	10.768	1.821	16,91	33.291	5.884	2.927	2.957
4	Minggir	11.310	2.558	22,62	35.577	8.395	4.164	4.231
5	Seyegan	15.385	3.660	23,79	47.601	12.566	6.261	6.305
6	Mlati	27.905	3.239	11,61	92.321	11.165	5.604	5.561
7	Depok	38.497	1.572	4,08	132.521	6.317	3.173	3.144
8	Berbah	15.906	2.081	13,08	52.546	7.359	3.630	3.729
9	Prambanan	16.303	3.684	22,60	50.604	12.339	6.186	6.153
10	Kalasan	23.207	2.828	12,19	77.462	9.923	4.922	5.001
11	Ngemplak	17.692	1.697	9,59	57.941	5.786	2.846	2.940
12	Ngaglik	28.572	2.126	7,44	97.076	7.982	3.951	4.031
13	Sleman	20.315	3.923	19,31	65.415	13.284	6.721	6.563
14	Tempel	17.547	4.076	23,23	54.260	13.366	6.731	6.635
15	Turi	10.783	2.147	19,91	34.682	7.522	3.805	3.717
16	Pakem	11.344	1.145	10,09	35.430	4.003	1.996	2.007
17	Cangkringan	9.554	2.046	21,42	30.568	6.802	3.398	3.404
Total		324.241	45.037	13,89	1.059.383	155.914	78.009	77.905

Sumber Bappeda Kabupaten Sleman 2014

paten Sleman telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sleman. Jumlah KK Miskin untuk seluruh Kabupaten Sleman ada sebesar 45.037 KK (13,89 persen), dan untuk Kecamatan Ngemplak berjumlah 1.697 KK (9,59 persen), Kecamatan Turi 2147 KK (19,91 persen), dan Kecamatan Cangkringan 2046 KK (21,42 persen). Untuk Kecamatan Cangkringan ada penurunan yang sangat besar dari 47,78 persen menjadi 21,42 persen penurunan angka ini dapat dimungkinkan karena adanya berbagai program pengentasan yang dilakukan oleh pemerintah dan banyaknya lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri yang membantu pemulihan sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak bencana erupsi Merapi. Namun secara keseluruhan untuk tingkat Kabupaten penurunan angka kemiskinan tidak besar yaitu dari 15,85 persen menjadi 13,89 persen. Rendahnya penurunan angka kemiskinan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengkaji lebih lanjut program-program pengentasan kemiskinan yang dilaku-

kan berbagai instansi di Kabupaten Sleman. Tahapan penelitian berikutnya adalah menggali permasalahan mendasar kemiskinan, partisipasi masyarakat khususnya keterlibatan perempuan miskin, dan jenis-jenis program antarinstansi .

4. Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sleman

Dari hasil penelitian dapat dianalisis bahwa berbagai program yang dilakukan oleh beberapa instansi belum nampak program pengentasan kemiskinan yang secara sinergi dilakukan bersama. Setiap instansi berjalan sendiri-sendiri meskipun sasaran programnya sama yaitu KK miskin. Program pengentasan kemiskinan yang secara khusus untuk kelompok perempuan belum tampak dilakukan secara sinergi antar instansi. Meskipun banyak diakui bahwa potensi perempuan dalam upaya pengentasan kemiskinan sangat penting. Dari hasil penelitian ini belum tampak program pengembangan kemampuan potensi perempuan di bidang ekonomi produktif dilakukan secara sinergi antar instansi. Oleh

karena itu untuk program pengentasan kemiskinan diperlukan program khusus pemberdayaan perempuan yang dilakukan secara sinergi antar instansi, agar dapat memberikan efek ganda pada tumbuhnya swadaya dalam mencukupi kebutuhan keluarga yang juga berpengaruh pada wilayah setempat. Sebagai wilayah yang kaya akan potensi alam pedesaan, Sleman perlu dukungan sektor ekonomi produktif yang mampu mengolah dan mengubah potensi alam menjadi karya inovatif yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Potensi wilayah yang tersedia seperti hasil bumi, salak pondoh, pisang, serta hasil pertanian lainnya merupakan kekayaan yang hendaknya diolah sehingga menambah perkembangan ekonomi masyarakat. Melalui program pemberdayaan perempuan akan meningkatkan kualitas hidup keluarga.

5. Hasil Focus Group Discussion

FGD dilaksanakan pada tanggal 4 November 2014 di Rumah Makan Mr. Blangkon, Jalan Kaliurang Yogyakarta. Peserta yang diundang dan hadir sebagai nara sumber adalah dari instansi SKPD Bappeda, Dinas Nakersos, BKBPMPP instansi tersebut merupakan penentu dan pelaksana dalam program pengentasan kemiskinan.

sedangkan peserta FGD antara lain Kasi Kesmas dan Kasi Ekobang Kecamatan Cangkringan, Turi, dan Ngemplak serta perwakilan kelompok sasaran. Dalam FGD peneliti memaparkan draf model pengentasan kemiskinan, melalui delapan langkah seperti tertera dalam Gambar 2.

Dari hasil diskusi, didapatkan berbagai masukan baik dari nara sumber, maupun dari peserta FGD yang terlibat sebagai pelaksana program serta sebagai sasaran program pengentasan kemiskinan, dapat dirangkum sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Sleman sangat mendukung model pengentasan berperspektif gender, mengingat masih ada ketimpangan gender di Kabupaten Sleman, yang dapat diketahui Kabupaten Sleman IPM 79,29 persen indeks pembangunan gender 75,76 persen ada kesenjangan 3,65 persen kesenjangan gender, hal ini dikarenakan akses pendidikan lama sekolah lebih bagus laki-laki, penguatan modal didominasi laki-laki, sehingga model pengentasan kemiskinan dengan perspektif gender jika dapat dijalankan akan baik, dan Sleman menjadi pioneer untuk perempuan dengan akses mengurangi kemiskinan, mengingat Sleman memiliki banyak potensi dan perkembangan yang sangat dinamis, sehingga tersedia *market* yang dapat dijadikan sarana pemasaran



Gambar 2
Rancangan Model

sebagai akses perempuan untuk berkembang dan mandiri. Untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan, subyek perlu dipikirkan strategi memperlakukannya untuk dapat mengetahui potensi dan kebutuhannya. Untuk implementasi model dapat diusulkan dengan mengambil salah satu kelompok sasaran di Sleman, misalnya dari P2KWSS, meskipun tahapan yang dirancang dirasa sudah cukup lengkap, tetapi perlu tahapan monitoring dan pendampingan yang berkelanjutan, agar model tampak hasilnya dengan nyata.

6. Analisis Pengentasan Kemiskinan Berperspektif Gender

Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu hasil bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari UU No 40 tahun 2004 tersebut terlihat, bahwa upaya untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat adalah salah satu program yang harus dilakukan oleh pemerintah meskipun bertahap. Beberapa program yang saat ini dijalankan dengan simultan adalah penyediaan perumahan murah, kesehatan dan pendidikan gratis bagi keluarga miskin, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat, juga harus melihat potensi yang dimiliki di wilayah sekitar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Apabila sudah mengetahui potensi wilayah tersebut, maka akan mampu mengetahui pula daya saing atau keunggulan dari wilayah tersebut, sehingga masyarakat di sekitar wilayah tersebut akan merasa sejahtera karena masyarakat mampu memiliki penghasilan yang cukup atau tidak dikatakan miskin

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensi, sehingga secara umum masyarakat miskin adalah suatu kondisi masyarakat yang berada dalam situasi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya secara layak. Mengingat persoalan struktural dan multidimensi tersebut, maka upaya penanggulangan seyogyanya diletakkan dan dipercayakan

kepada masyarakat itu sendiri, tentunya dengan didukung dan difasilitasi oleh pemerintah, maupun pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil lainnya, sehingga proses penanggulangan kemiskinan akan menjadi suatu gerakan masyarakat yang akan menjamin potensi kemandirian dan keberlanjutan guna meningkatkan kehidupannya yang lebih layak (Keppi Sukes, 2009: 1). Selanjutnya salah satu rekomendasinya hasil penelitiannya adalah model penanggulangan kemiskinan partisipatif yaitu yang berasal masyarakat terutama perempuan miskin dan tokoh masyarakat adalah alternatif yang perlu diuji coba. Model ini dimulai dari kegiatan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang perempuan miskin, perencanaan dan pelaksanaan program dengan prinsip adil, partisipatif, dan berorientasi pemecahan masalah, kelembagaan terpadu dan monitoring serta evaluasi periodik dan berkelanjutan (Keppi Sukes, 2009: 15).

Masalah kemiskinan di Indonesia masih didominasi kemiskinan di pedesaan. Data Susenas 2003 menunjukkan bahwa pada tahun 2003 penduduk miskin di pedesaan diperkirakan 67 persen, dan sebagian bekerja disektor pertanian. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di pedesaan cenderung lebih tinggi dari perkotaan. Masyarakat miskin di pedesaan dihadapkan pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia, terbatasnya pemilikan lahan yang rata-rata kurang dari 0,5 ha, banyaknya rumah tangga yang tidak mempunyai asset, terbatasnya alternatif lapangan kerja belum tercukupinya pelayanan publik, lemahnya kelembagaan organisasi masyarakat, dan ketidakberdayaan dalam menentukan produk yang dihasilkan. Berbagai persoalan agraria dan pertanian mempunyai implikasi luas terhadap kehidupan petani dan buruh tani. Dari hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa dalam pengentasan kemiskinan perlu melibatkan perempuan sebagai subyek, agar perempuan dapat mengetahui permasalahan, potensi dan kebutuhannya, sehingga akan berkembang sesuai potensi. Adanya bencana gunung merapi dapat diduga bahwa jumlah KK miskin di daerah Kabupaten Sleman akan meningkat pasca bencana

Gunung merapi, karena bencana Gunung Merapi selain korban jiwa juga kerugian material yang tidak sedikit (Indriyati & Nugrahani, 2010).

Tiga Pilar Pendekatan (Sosio Kultural, ekonomi, dan Lingkungan hidup): Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia lahir dari manusia lain, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu orangpun dapat hidup tanpa orang lain. Kondisi tersebut merupakan suatu realitas sosiokultural yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari secara riil karena menyangkut kondisi kehidupan manusia didalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat sekelompok orang yang saling berinteraksi satu dengan lainnya, sehingga dapat menimbulkan suatu tata aturan bagi kehidupan bersama. Dengan demikian realitas sosiokultural (sosial budaya) merupakan kenyataan atau keadaan sosial budaya yang menempati daerah atau lingkungan sekitar kehidupan masyarakat. Dengan gambaran lebih jelas bahwa realitas sosiokultural adalah keadaan sosial budaya yang dapat dilihat dan sering terjadi setiap waktu disekitar kehidupan masyarakat (Tri Cahyo Wibowo, 2014).

Upaya meningkatkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, kualitas kehidupan dan martabat manusia di segala aspek, baik aspek fisik, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Secara sengaja atau tidak, pembangunan seringkali hanya diinterpretasikan sebagai pembangunan fisik dan ekonomi saja, walaupun terlihat sederhana penyerderhanaan tersebut mempunyai konsekuensi yang besar terhadap cara pandang pihak-pihak tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan di lapangan dan konsistensinya dalam mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan yang pada hakekatnya untuk kepentingan peningkatan kehidupan masyarakat. Paling tidak terdapat dua konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari hasil proses penyerderhanaan tersebut: Pertama, konsekuensi terhadap proses pembangunan. Penyerderhanaan ini mengakibatkan proses pembangunan hanya

dilihat dalam perspektif perubahan masyarakat yang bersifat partial, bukan holistik. Pembangunan fisik dengan demikian hanya dilihat dalam perspektif teknikal saja dan kurang mempertimbangkan perspektif humanitas dan sosio-kultural masyarakat. Kedua, konsekuensi terhadap hasil pembangunan.

Penyerderhanaan ini mengakibatkan keberhasilan pembangunan hanya dilihat atau dinilai dari banyaknya fasilitas fisik yang telah dibangun. Padahal dalam kenyataannya, hal tersebut kurang merefleksikan keadaan yang sesungguhnya dimana keberhasilan pembangunan infrastruktur fisik pada dasarnya sangat terkait erat dengan pemanfaatan infrastruktur tersebut oleh masyarakat. Oleh karena itu, bisa saja di suatu daerah telah banyak fasilitas yang dibangun, tetapi dampak positif dari pembangunan tersebut bagi peningkatan kehidupan masyarakat sangat kecil. Keadaan ini tentunya harus segera diperbaiki dengan cara memperluas dan mengikutsertakan pendekatan *socio-cultural* dan *socio-economy* dalam pendekatan pembangunan yang telah ada. Pendekatan sosiokultural dalam pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai usaha untuk mempertimbangkan aspek aspek sosiokultural dan menggali nilai kultural serta pengetahuan lokal yang positif di dalam masyarakat yang berguna dalam proses pembangunan, termasuk pada pembangunan prasarana fisik, dengan cara ini pengabaian terhadap aspek sosio-kultural masyarakat dalam pembangunan dapat dihindarkan. Sebagai hasilnya tercipta keseimbangan dan sinergi antara pendekatan teknis dan sosiokultural. Apabila hal ini dapat diwujudkan maka pembangunan infrastruktur fisik lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan terjadi perubahan kondisi sosiokultural masyarakat ke arah yang lebih baik sesuai dengan fase-fase yang diharapkan dalam pembangunan (Dhenov, 2008). Demikian juga dalam upaya pengentasan kemiskinan, tiga pendekatan sosiokultural, ekonomi dan lingkungan hidup dapat dilakukan secara holistik, sebab jika pendekatan hanya dilakukan dari sisi ekonomi, maka hasilnya akan lebih optimal. Proses

pemberdayaan dilakukan dengan mengantarkan agar manusia sadar akan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seutuhnya, dan pendekatan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan pendapatan, sedangkan pendekatan lingkungan hidup diharapkan akan dapat ikut melestarikan lingkungan untuk generasi penerus.

Pemberdayaan Berperspektif Gender:

Pemberdayaan mempunyai makna harafiah membuat seseorang dan kelompok berdaya, istilah lain untuk memberdayakan adalah penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Didalam pemberdayaan terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegasan hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Proses pemberdayaan diusahakan agar orang lain berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidak seimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dan orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Pemberdayaan diterjemahkan sebagai suatu usaha untuk mendapatkan kontrol dan sumber daya yang dibutuhkan. Suatu proses dikatakan memberdayakan apabila mampu menolong perempuan untuk dapat mengembangkan kemampuan sehingga mereka menjadi entitas yang mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan mampu mengambil keputusan secara otonom (Fatterman, et. all., 1996). Proses pemberdayaan menempatkan perempuan sebagai bagian terpenting dalam implementasi program (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, 2013)

Lahir dan berkembangnya konsep *empowerment* memerlukan sikap dan wawasan yang mendasar, jernih serta kuat mengenai kekuasaan atau power itu sendiri. Kerancuan yang menyertai perkembangan konsep *empowerment* itu tidak saja disebabkan oleh adanya berbagai versi dan bentuk *empowerment* akan tetapi juga disebabkan karena tumbuh dan berkembangnya konsep *empowerment* tersebut tidak disertai dengan

terjadinya refleksi mendasar secara jernih dan kritis terhadap konsep kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu, memahami soal pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dengan memahami tentang kekuasaan atau *power*; orang yang tidak berdaya dapat berdaya dapat disebut sebagai orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Kekuasaan, berarti menguasai sesuatu, sehingga mempunyai wewenang untuk memutuskan sesuatu. Dalam melaksanakan pengembangan masyarakat berwawasan gender perlu partisipasi masyarakat. Partisipasi disini diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat sepenuhnya baik laki-laki maupun perempuan dalam kegiatan pembangunan. Keterlibatan ini harus dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang perbedaan gender, suku, ras, kelas, agama atau orientasi jenis kelamin, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai perencanaan dan pelaku (subjek) pembangunan.

Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya membangkitkan daerah yang miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan mendampingi perempuan untuk peningkatan potensi perempuan yang telah ada, melalui pengembangan usaha produktif dan diversifikasi hasil lokal secara berkelompok. Dalam proses pemberdayaan perempuan ini diajak untuk mengenali dulu apa yang menjadi kebutuhan riil perempuan baik kebutuhan praktis maupun kebutuhan strategis, dan permasalahannya. Dengan mengetahui kebutuhannya sendiri diharapkan mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Sehingga perempuan sendirilah yang menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari solusi yang ditentukan. Proses ini pernah dilakukan pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui hibah PPM IbM tahun 2009, di Parangtritis Bantul, yang hasilnya bahwa dengan metode partisipasi aktif, perempuan Kelompok perempuan pesisir setelah mendapatkan tambahan pelatihan, dan pendampingan pelaksanaan hibah PPM 2009 ini adalah perempuan pesisir menjadi mandiri dalam hal ekonomi dan sosial, dan dapat ikut mengembangkan lingku-

ngan sosialnya. Dengan meningkatnya kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi akan meningkatkan pula penghasilan dan kesejahteraan keluarganya, yang selanjutnya akan mampu mempengaruhi perempuan lain agar mau ikut ambil bagian dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan, sehingga akhirnya mampu pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir selatan (Indriyati, dkk, 2009).

Hasil penelitian PSW UGM tahun 2006, merumuskan bahwa pada hakekatnya sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan. Selanjutnya, dalam salah satu rekomendasi penelitiannya menyebutkan bahwa perlunya dirumuskan kebijakan dan rencana program-program pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai implementasi Inpres no 9 tahun 2000 (Tim PSW UGM, 2006: 70). Dengan penelitian ini nantinya akan berupaya menerapkan model pendekatan sosio kultural, ekonomi dan lingkungan, melalui pendekatan tersebut diharapkan perempuan miskin mampu mengenali dirinya sebagai manusia yang utuh dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, dan dengan pendekatan kultural dapat diketahui faktor-faktor budaya yang mendukung perubahan. Pendekatan ekonomi ini diharapkan perempuan dapat meningkatkan penghasilannya melalui usaha ekonomi produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Sedangkan dengan pendekatan lingkungan perempuan diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungannya melalui penyadaran untuk masa depan generasi penerusnya.

D. Penutup

Kesimpulan: Hasil penelitian diketahui jumlah KK miskin perempuan hampir sebanding dengan jumlah KK laki-laki, perlu dikaji lebih dalam bagaimana keterlibatan kaum perempuan dalam pengentasan kemiskinan. dari data peta

kemiskinan diketahui bahwa jumlah KK Miskin untuk seluruh Kabupaten Sleman ada sebesar 45.037 KK (13,89 persen). Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh berbagai SKPD, tetapi belum diketahui secara pasti tingkat sinergitas antarinstansi dalam program pengentasan kemiskinan, meskipun data yang digunakan sudah satu sumber. Program dan kegiatan antar instansi berjalan sendiri-sendiri karena masih sering terjadi program sektoral. Hasil FGD dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman sangat mendukung model pengentasan berperspektif gender, mengingat masih ada ketimpangan gender di Kabupaten Sleman, yang dapat diketahui Kabupaten Sleman IPM 79,29 persen indeks pembangunan gender 75,76 persen ada kesenjangan 3,65 persen kesenjangan gender, dikarenakan akses pendidikan lama sekolah lebih bagus laki-laki, penguatan modal didominasi laki-laki, perempuan masih kurang mendapatkan akses, sehingga model pengentasan kemiskinan dengan perspektif gender dapat diujicobakan di Sleman, dan menjadi pionir untuk perempuan dalam mengurangi kemiskinan.

Rekomendasi: Model pendekatan sosio-kultural ekonomi dan lingkungan hidup alam pengentasan kemiskinan berperspektif gender dapat dijadikan rujukan untuk program-program pembangunan di daerah. Perlu dilakukan program yang sinergi antarinstansi dalam pengentasan kemiskinan agar hasil dari program dapat benar-benar mengurangi angka kemiskinan.

Pustaka Acuan

- Badan Pemberdayaan Perempuan DIY. (2003). *Laporan Tim Pembangunan Berperspektif Gender*, Yogyakarta
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY (2013). *Panduan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat*
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman. (2012). *Kajian Dana Bergulir Sebagai Bagian Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, Sleman
- Bappenas. (2005). Hasil Kajian Pembelajaran dari Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan

- BPS dengan BAPPEDA Kabupaten Sleman. (2013). *Kabupaten Sleman Dalam Angka 2012/2013*, BPS Kabupaten Sleman.
- BPS dengan BAPPEDA Kabupaten Sleman. (2009). *Penduduk Kabupaten Sleman Hasil Registrasi Penduduk Pertengahan tahun 2009*, BPS Kabupaten Sleman
- Dhenov, <http://dhenov.blogspot.com/2008/02/pendekatan-sosio-kultural-dalam.html>, diunduh 26 Juni 2014
- Forum Komunikasi PSW DIY. (2000). *Laporan hasil Penelitian Evaluasi Program Daerah dan Non Sektor*, Yogyakarta
- Handayani, Sih dan Yos Soetiyoso. (1997). *Merekonstruksi Realitas Dengan Perspektif Gender*, Sekretaris Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY) kerjasama OXFAM UK/I, Yogyakarta.
- Indriyati, Nugahani, Gunawan, Bahrum, dan Purwanti. (2009). *Laporan Ibm Kelompok Perempuan Usaha Pengolahan Makanan Hasil Laut di Pesisir Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul* (Hibah IbM Pengabdian Dikti)
- Indriyati, dan Nugahani. (2010). *Pemberdayaan Perempuan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Studi Tentang Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman)* (Hibah Penelitian Studi Kajian Wanita)
- Keppi Sukesu. (2009). *Perempuan dan Kemiskinan Profil dan Upaya Pengentasan*, Makalah Seminar Gender dan Keadilan Sosial, Pusat Studi Kependudukan UGM kerjasama DP2M Dirjen Dikti .
- Lembaran Negara. (2004). Undang-Undang No. 40, *Sistem Jaminan Sosial Nasional* (SJSN)
- Maswita Jaya. (2006). *Perempuan Indonesia 2005*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- Prasetyo Murniati. (2004). *Getar Gender*, Yabinkas Yogyakarta
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Tim Peneliti PSW UGM, *Profil Gender Development Index (GDI) Dan Gender Empowerment Measure (GEM) Kabupaten Sleman*, PSW UGM Kerjasama dengan Pemda Kabupaten Sleman
- Tri Cahyo Wibobowo, <http://tricahyowibow.blogspot.com/2014/02/realitas-sosio-kultural.html>, diunduh tanggal 26 Juni 2014
- Tri Sakti Handayani & Sugiyarti, *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*, Universitas Negeri Malang.
- Undang-Undang (UU) No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

